

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Pengantar Editor.....	vii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan.....	1
a. Pengertian Hukum Agraria.....	2
b. Penggunaan Istilah Hukum Pertanahan	7
2. Ruang Lingkup Hukum Pertanahan.....	8
3. Landasan Hukum Pertanahan	13
a. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pertanahan Nasional	13
b. Nilai-nilai Hukum Adat sebagai Landasan Hukum Pertanahan Nasional	15
c. Asas-Asas Hukum Pertanahan Nasional.....	22
4. Metode Penulisan	40
a. Jenis penelitian.....	40
b. Metode Pendekatan	42
c. Sumber Bahan Hukum.....	43
d. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	44
e. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB II SEJARAH HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA	47
1. Hukum Pertanahan pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang.....	47

- a. Masa Sebelum Tahun 1870.....49
- b. Pemberlakuan *Agrarische Wet* Tahun 1870 ..57
- c. Pemberlakuan *Domein Verklaring* (Staatsblad 1870 Nomor 118)60
- d. Masa Penjajahan Jepang.....68
2. Hukum Pertanahan Pasca Kemerdekaan sampai Diundangkan UUPA.....71
3. Masa Orde Baru dan Reformasi Agraria77

BAB III POLITIK HUKUM PERTANAHAN NASIONAL 81

1. Pengertian Politik Hukum Pertanahan.....81
2. Politik Hukum Pertanahan Nasional84
 - a. Era Rezim Orde Lama86
 - b. Era Rezim Orde Baru.....89
 - c. Era Orde Reformasi92
3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pertanahan ..94
4. Pengaturan Bidang Pertanahan dalam Undang Undang Cipta Kerja 101
5. Politik Hukum dalam Rancangan Undang Undang Pertanahan..... 104
 - a. Urgensi Penyusunan 104
 - b. Materi Muatan 110
 - c. Isu-isu Strategis 114

BAB IV PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH NEGARA 139

1. Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Negara 139
 - a. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah ...140
 - b. Hak-hak atas tanah 141
2. Hak Menguasai Negara atas Tanah pada Masa Penjajahan, Kemerdekaan dan Orde Baru 142
 - a. Hak Menguasai Negara di Bidang Kehutanan .. 151
 - b. Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan 156

c.	Hak Menguasai Negara di Bidang Transmigrasi.....	160
d.	Hak Menguasai Negara di Bidang Pengairan..	161
e.	Hak Menguasai Negara di Bidang Minyak dan Gas Bumi	167
f.	Hak Menguasai Negara di Bidang Tenaga Nuklir	169
g.	Hak Menguasai Negara di Bidang Telekomunikasi	169
h.	Hak Menguasai Negara di Bidang Perkeretaapian.....	171
i.	Hak Menguasai Negara di Bidang Tenaga Listrik.....	173
j.	Hak Menguasai Negara atas Tanah Adat	174
k.	Pelimpahan Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan.....	177
l.	Hak Menguasai Negara dan Hak Pengelolaan.	179
m.	Penyimpangan Makna Hak Menguasai Negara atas Tanah	186
3.	Hak Menguasai Negara atas Tanah pada Era Reformasi	198
4.	Penafsiran Hak Menguasai Negara atas Tanah oleh Mahkamah Konstitusi	202
a.	Interpretasi Hak Menguasai Negara atas Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya.....	202
b.	Interpretasi Hak Ulayat untuk Hutan Adat..	204
5.	Reinterpretasi Makna Hak Menguasai Negara atas Tanah.....	205
BAB V	HAK-HAK ATAS TANAH	209
1.	Hak-hak Atas Tanah menurut Hukum Barat ...	213
2.	Hak-hak atas Tanah menurut Hukum Adat.....	217
3.	Hak-hak atas Tanah menurut UUPA.....	220
a.	Hak Milik (HM).....	221

- b. Hak Guna Usaha (HGU)223
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)224
- d. Hak Pakai (HP).....226
- 4. Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA..227

BAB VI	JENIS DAN TATA CARA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH.....	233
1.	Jenis-jenis Hak atas Tanah di Indonesia.....	235
a.	Hak-Hak Atas Tanah Individual atau Perorangan.....	235
b.	Hak-Hak Atas Tanah Kolektif dan Komunal ..	236
c.	Hak Atas Tanah Primer dan Sekunder.....	248
2.	Macam-macam Hak atas Tanah Menurut UUPA.	249
a.	Hak Milik (HM).....	249
b.	Hak Guna Usaha (HGU)	252
c.	Hak Guna Bangunan (HGB)	260
d.	Hak Pakai (HP).....	268
e.	Hak Pengelolaan (HPL)	277
3.	Tata Cara Perolehan Hak atas Tanah	296
a.	Perolehan Hak yang Terjadi karena Undang-undang	297
b.	Perolehan Hak yang Terjadi karena Penetapan Pemerintah.....	297
c.	Perolehan Hak atas Tanah yang Berasal dari Hukum Adat.....	299
BAB VII	PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH	303
1.	Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah	303
2.	Tujuan Pendaftaran Hak atas Tanah	308
3.	Sistem Pendaftaran Tanah.....	311
a.	Sistem Publikasi Positif (<i>Registration of Titles</i>).....	311
b.	Sistem Publikasi Negatif (<i>Registration of Deeds</i>).....	313

4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.....317
5. Pendaftaran Tanah secara Elektronik323

BAB VIII PERAN PPAT DALAM PENDAFTARAN

- TANAH..... 331**
1. Kedudukan PPAT dalam Hukum Pertanahan..331
 2. Tugas dan Wewenang PPAT dalam Pendaftaran Tanah.....338
 3. Peran PPAT dalam Peralihan Tanah Bekas Hak Adat dan Pembayaran BPHTB.....361
 4. Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta PPAT.....367

DAFTAR PUSTAKA 371